

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Secara kuantitatif pelaksanaan pembangunan di daerah Riau telah mencapai hasil yang cukup menggembirakan seperti yang terlihat dari data tingkat pertumbuhan ekonomi. Selama Pelita IV pertumbuhan ekonomi Riau tercatat rata-rata sebesar 6,28 %, selama Pelita V 9,95 % dan pada pertengahan Pelita VI sebesar 9,48 %. Pada tahun 1996, sebelum terjadinya krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi Riau masih cukup tinggi yaitu 8.89 % sebelum akhirnya turun menjadi 6.9 % pada tahun 1997. Pertumbuhan yang relatif tinggi ini juga disebabkan karena adanya kontribusi pertumbuhan ekonomi Batam. Tanpa Batam pertumbuhan ekonomi Riau menjadi - 5%, namun masih jauh lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi cukup besar (sekitar -15 persen).

Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu akan mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini cenderung hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, biasanya masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Berdasarkan data yang ada di daerah Riau telah terjadi kesenjangan (disparitas) terutama antar daerah dan sektor serta antar golongan masyarakat. Kesenjangan antar daerah tingkat II paling menyolok adalah antara daerah otorita Batam yang tumbuh lebih dari 17 % dengan daerah tingkat II yang lain, misalnya

daerah tingkat II Inderagiri Hulu yang tumbuh hanya sekitar 8,98 persen. Demikian juga kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antar golongan dalam masyarakat. Kesenjangan ini cukup berbahaya karena menyimpan potensi konflik kerusuhan dan kecemburuan sosial yang pada gilirannya membahayakan kestabilan nasional. Akibat lanjut dari kesenjangan ini adalah munculnya daerah-daerah tertinggal dalam pembangunan yang menimbulkan daerah-daerah miskin di pedesaan. Penelitian Almasdi Syahza (1998) juga menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antar daerah di Riau. Berdasarkan Index Williamson ketimpangan pembangunan di daerah Riau pada tahun 1993 adalah sebesar 0,7438 dan pada tahun 1994 meningkat menjadi 0,7684. Angka index ini memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan di daerah Riau semakin kurang merata antar daerah.

Apabila dilihat pembangunan perekonomian daerah Riau dilandasi oleh dua pola umum pembangunan yaitu pola umum jangka panjang dan pola umum jangka pendek (Pelita). Pola umum jangka panjang memuat landasan pembangunan dengan kebijaksanaan ekonomi yang diarahkan kepada dua sektor kunci yaitu sektor pertanian dan sektor industri dengan memperhatikan keterkaitan dengan sektor lain. Secara spesifik arah kebijaksanaan pembangunan daerah Riau masih menitik beratkan pada sektor kunci. Arah pembangunan tersebut adalah untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan kontribusi dalam pembentukan PDRB Propinsi Riau.

Dilihat dari segi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dilaksanakan oleh sektor swasta dan beberapa Daerah Tingkat II, hampir semua Daerah Tingkat II memanfaatkan modal tersebut. Tetapi

kalau dilihat dari segi ekonomi belum menunjukkan hasil yang diharapkan, karena masih banyaknya masyarakat miskin atau keluarga pra sejahtera di sekitas pengembangan perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena kegiatan perkebunan berorientasi pada skala besar dan adanya ketentuan dari pemerintah, bahwa peresta transmigrasi pada lokasi perkebunan 80:20, yakni 80 persen peserta transmigrasi adalah penduduk asal (pendatang) dan 20 persen penduduk tempatan (lokal). Dengan demikian masyarakat di sekitar pengembangan perkebunan belum dapat merasakan manfaat kehadiran proyek tersebut dalam kegiatan mereka sehari-hari ini.

Kesenjangan di daerah tertinggal ini semakin diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan non-pertanian (ekonomi perkotaan). Pada tahun 1996 sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi rakyat pedesaan Riau hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2 % sementara sektor industri melaju sebesar 14 %. Kesenjangan ini pada akhirnya akan berakibat serius terhadap tingkat kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini ditunjukkan, misalnya, oleh kesenjangan tingkat konsumsi antara penduduk pedesaan dan perkotaan. Pada tahun 1990 ratio konsumsi penduduk desa dengan kota adalah sebesar 64 % tetapi pada tahun 1996 menurun menjadi 60 %. Jika masalah ini tidak ditangani secara serius, maka kesenjangan antar kota dan desa akan semakin parah, dan daerah-daerah tertinggal akan semakin banyak ditemui di daerah Riau.

Adanya daerah-daerah tertinggal ini tidak hanya membawa kemiskinan bagi masyarakat tetapi dalam jangka panjang kesenjangan yang bersifat akumulatif ini akan menyebabkan daerah yang tertinggal akan semakin jauh tertinggal sementara

yang maju akan tetap maju dengan percepatan yang semakin sulit dikejar. Hal ini karena adanya perbedaan sumber daya manusia, pertumbuhan awal dan hasil pembangunan berjalan yang secara akumulatif mendorong pertumbuhan selanjutnya sehingga akselerasi pembangunan di kedua daerah akan tetap berbeda. Kesenjangan ini hanya dapat diatasi dengan campur tangan pemerintah dengan cara mengontrol daerah tertinggal sehingga basis perekonomian menjadi terangkat untuk memacu pertumbuhan dan bersaing dengan lebih fair dengan daerah lain.

Pembangunan yang dilaksanakan selama tiga dekade belakangan ternyata belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan. Terjadinya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan karena bias dan distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Akibatnya adalah timbul daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terkebelakang.

Daerah-daerah tertinggal ini sulit untuk ditingkatkan kesejahteraannya karena selain pembangunan yang selama ini distortif juga karena masyarakat pedesaan tersebut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan; seperti pendidikan dan keterampilan yang rendah, tidak ada modal usaha, tidak punya tanah atau luasnya yang tidak layak dan lain-lain. Disamping itu masyarakat daerah tertinggal tersebut relatif terisolir dengan jumlah penduduk yang relatif jarang sehingga potensinya untuk berkembang menjadi terhambat.

Faktor utama penyebab kemiskinan di daerah pedesaan adalah kurangnya pemilikan lahan pertanian. Sementara sumber mata pencarian utama masyarakat pedesaan adalah dari sektor pertanian. Kurangnya pemilikan lahan ini disebabkan

karena banyaknya penguasaan lahan bagi pemilik modal atau perusahaan dalam bentuk HPH, HTI, dan HGU. Pemilik modal ini melakukan usaha dalam bentuk pengambilan kayu untuk bahan baku industri. Setelah kayunya habis dilanjutkan dengan usaha perkebunan skala besar, khususnya perkebunan kelapa sawit.

Dari uraian di atas peneliti mencoba melakukan studi dampak kehadiran kawasan perkebunan kelapa sawit swasta di daerah Kuantan Singingi terhadap aspek ekonomi yakni; perubahan komposisi penduduk, distribusi tingkat pendidikan masyarakat; status pemilikan lahan; diversifikasi peluang usaha; penyerapan tenaga kerja, peningkatan lapangan pekerjaan, pendapatan keluarga, perkembangan ekonomi wilayah, daya dukung lahan pertanian serta ingin mengetahui kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Di daerah Kuantan Singingi sedang berkembang bermacam proyek perkebunan baik perkebunan karet maupun perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh pihak swasta dan BUMN. Khusus dalam penelitian ini peneliti hanya mengkaji dampak pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh pihak swasta di daerah Kuantan Singingi. Untuk itu masalah yang akan dikaji antara lain:

1. Apakah keberadaan kawasan perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta di Kabupaten Kuantan Singingi akan membuka peluang usaha, peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya.
2. Bagaimanakah distribusi pendapatan keluarga bagi masyarakat sekitar kawasan pengembangan perkebunan terhadap masyarakat sekitar kawasan pengembangan perkebunan.



3. Apakah dengan pengembangan perkebunan menyebabkan terjadinya perubahan status kepemilikan lahan bagi masyarakat daerah sekitarnya.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ekonomi masyarakat di sekitar kawasan pengembangan perkebunan kelapa sawit swasta, antara lain:

1. Mengetahui keadaan ekonomi wilayah sebagai akibat pengembangan perkebunan.
2. Status kepemilikan lahan; diversifikasi peluang usaha; peningkatan lapangan pekerjaan, distribusi pendapatan keluarga, perubahan komposisi penduduk, dan distribusi tingkat pendidikan masyarakat.
3. Ingin menggambarkan secara jelas keadaan ekonomi masyarakat sekitar pengembangan perkebunan.

### 1.4 Kontribusi Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan kegiatan-kegiatan atau strategi apa yang mesti ditempuh oleh perusahaan dan pemerintah untuk mengatasi kelompok-kelompok masyarakat prasejahtera di sekitar kawasan pengembangan perkebunan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dampak keberadaan perkebunan swasta terhadap beberapa aspek ekonomi bagi masyarakat.
3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar kawasan pengembangan perkebunan.